



Dinas

Dagkop-riuum
Lutim

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN Tahun 2022

**Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Soekarno Hatta, No Telp (0474) 321423, Fax (0474) 321423
Malili ,92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2022

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021;

b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

DJS DAGKOPRJNUM

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor);
6. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor / /Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor / / Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Penanggung Jawab bertugas :
- Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun;
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun; dan
- Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Ketua bertugas :
- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun;
- Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan danpetunjuk kepada tim penyusun;
- Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tim penyusun kepada penanggung jawab; dan
- Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Sekretaris bertugas :
- Menyusun dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja tahun 2021;
- Melakukan telaahan terhadap rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
- Merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2022; dan
- Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Anggota bertugas :
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah;
- Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan;
- Melakukan telaahan terhadap isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- Melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
- Merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2022;
- Menyesuaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 yang telah ditetapkan; dan
- Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, Juni 2022
KEPALA DINAS,



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP:19751001 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	44
BAB IV PENUTUP.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2022

Tabel 2 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2022

Tabel 3 : Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang atas izin-Nyalah semata kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

Sesuai amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 21 ayat 3, bahwa Renja Perubahan -SKPD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada rancangan awal RKPD. Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja Perubahan harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur ini berisi tentang prioritas program dan indikasi kegiatan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian serta indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak untuk terselenggaranya perbaikan kinerja manajemen (performance planning) pemerintahan.

Malili, Juni 2021

KEPALA DINAS,



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP:19751001 199612 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana kerja perubahan OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan OPD untuk merumuskan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2022.
3. Renja Perubahan OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022.

Penetapan dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang menjadi perhatian antara lain :

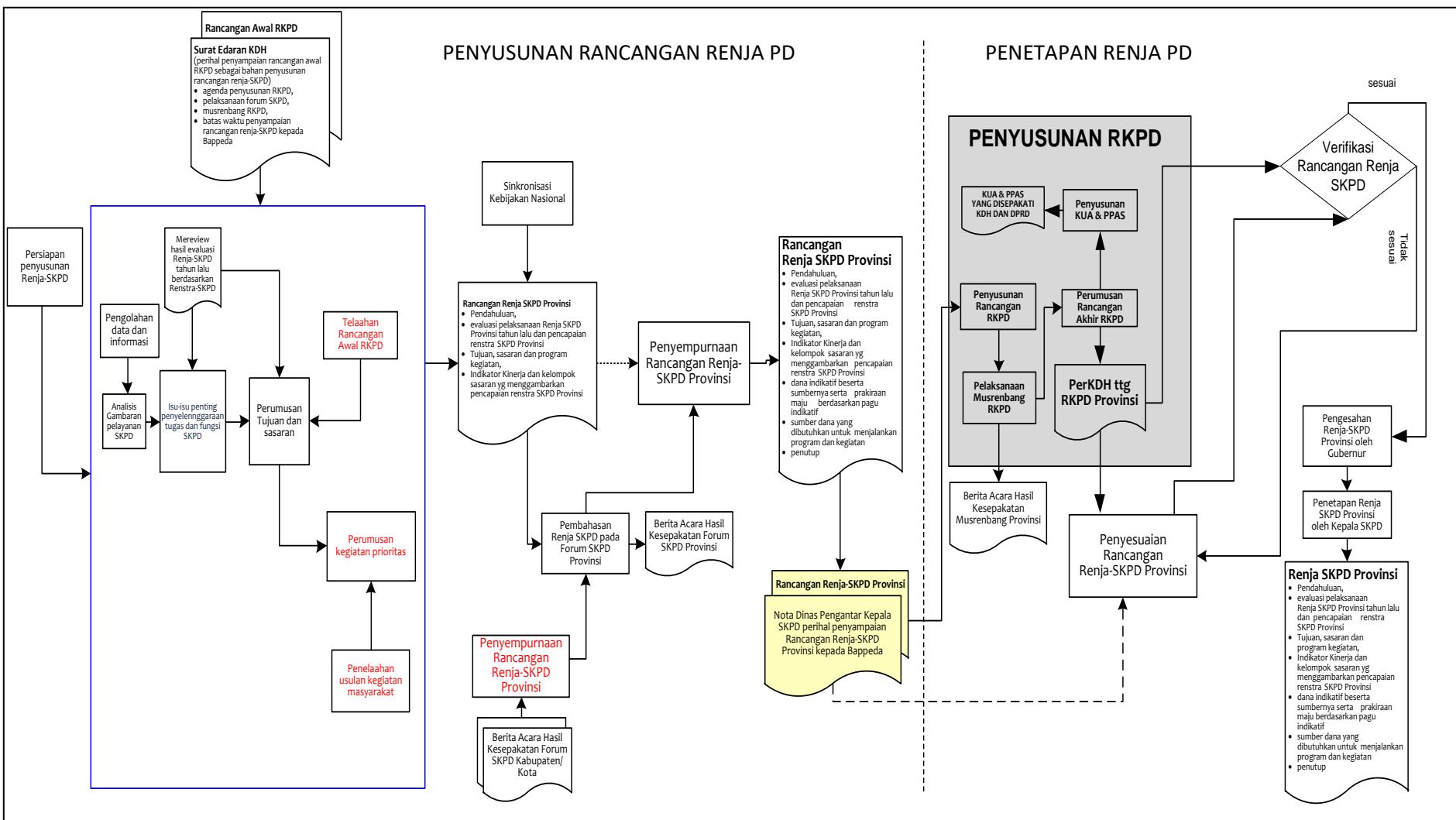
1. Program dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.
3. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja OPD tahun 2022 adalah :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Adanya penambahan dan pengurangan anggaran;
- c. Adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Bagan alur penyusunan RENJA OPD adalah sebagai berikut :



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun Anggaran 2022 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rancangan Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2022 adalah sebagai acuan untuk sinergitas antara penyusunan perencanaan program pembangunan, penganggaran serta pengawasan pembangunan Tahun 2022 yang merujuk pada Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2022-20246 guna terwujudnya efektifitas alokasi anggaran dalam pembangunan. Dengan penyusunan Rancangan Renja Perubahan diharapkan terjadi sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan OPD dan penyesuaian prioritas kerja Rancangan Renja Perubahan OPD dengan plafon anggaran/pagu dana OPD yang termuat dalam APBD.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2022 :

1. Adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. Pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini memuat tentang gambaran umum, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN, Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT, Bab ini menguraikan rencana kerja yang belum terlaksana, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan pada tahun 2022.

BAB IV PENUTUP, yang memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2022

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2022, selain itu juga memperhatikan dokumen Resntra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Sampai dengan akhir bulan Triwulan II Mei tahun 2022 penyerapan anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian masih relatif rendah. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pekerjaan yang proses pengajuan administrasi pembayarannya pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Adapun Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah.

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi tahun 2022						
						I	II	III	IV									
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10=12/7x100%	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2																		
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95	4,302,414,041	91.54	451,526,117	69.75	1,364,575,243					95.74	1,816,101,360	100.78%	42.21%

2	17	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (%)	100	60,057,765	100	2,375,000	100	15,541,350				100	17,916,350	100.00%	29.83%
2	17	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	3	22,459,700	1	2,000,000	1	4,266,600				2	6,266,600	66.67%	27.90%
2	17	1	2.01	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2,636,265	-	-	1	-				2	-	100.00%	0.00%
2	17	1	2.01	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	3,371,300	-	-	-	-				-	-	0.00%	0.00%
2	17	1	2.01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	10	31,590,500	2	375,000	2	11,274,750					11,649,750	0.00%	36.88%
2	17	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	3,285,533,586	100	359,167,275	100	1,125,457,664					1,484,624,939	0.00%	45.19%

2	17	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	26	3,248,801,786	27	356,491,775	28	1,112,897,664								1,469,389,439	0.00%	45.23%
2	17	1	2.02	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	18	36,731,800	7	2,675,500	3	12,560,000								15,235,500	0.00%	41.48%
2	17	1	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar (%)	100	19,060,000	-	-	100	8,015,000								8,015,000	0.00%	42.05%
2%	17	1	2.03	6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	19,060,000	-	-	1	8,015,000								8,015,000	0.00%	42.05%
2	17	1	2.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD (%)	100	5,786,600	96.34	-	47	2,549,150								2,549,150	0.00%	44.05%
2	17	1	2.04	7		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	4	5,786,600	1	-	1	2,549,150								2,549,150	0.00%	44.05%

2	17	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	58,749,040	100	2,000,000	50	4,208,600											6,208,600	0.00%	10.57%
2	17	1	2.05	3		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	12	13,509,040	5	2,000,000	2	2,388,600											4,388,600	0.00%	32.49%
2	17	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI (orang)	1	5,340,000	-	-	-	-										-	0.00%	0.00%	
2	17	1	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	14	39,900,000	1	-	-	-	1,820,000								1	1,820,000	7.14%	4.56%	
2	17	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (%)	100	611,285,250	77.37	60,752,164	77.37	152,966,040									95.50	213,718,204	95.50%	34.96%	

2	17	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor yang disediakan (jenis)	10	3,878,400	8	-	10	2,002,550					10	2,002,550	100.00%	51.63%
2	17	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	14	1,573,500	4	-	10	1,526,000					14	1,526,000	100.00%	96.98%
2	17	1	2.06	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (unit)	2	3,000,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%
2	17	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis)	20	3,252,350	6	717,450	6	713,450					12	1,430,900	60.00%	44.00%
2	17	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (jenis)	3	12,800,000	3	-	3	2,137,800					3	2,137,800	100.00%	16.70%
2	17	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (exemplar)	60	8,220,000	60	-	60	3,200,000					60	3,200,000	100.00%	38.93%
2	17	1	2.06	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	370	10,620,000	-	-	55	550,000					55	550,000	14.86%	5.18%
2	17	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	633	541,941,000	78	56,034,714	81	135,861,240					159	191,895,954	25.12%	35.41%

2	17	1	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis yang diadministrasikan (dokumen)	50	26,000,000	12	4,000,000	13	6,975,000					25	10,975,000	50.00%	42.21%
2	17	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan (%)	100	42,400,000	-	-	-	-					100	-	100.00%	0.00%
2	17	1	2.07	5		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	4	17,400,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%
2	17	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan (unit)	4	25,000,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%
2	17	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	123,091,800	97.92	15,966,678	83.34	33,426,439					100.40	49,393,117	100.40%	40.13%
2	17	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	1500	15,691,800	370	-	375	5,936,525					745	5,936,525	49.67%	37.83%

2	17	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air terbayarkan (rekening)	3	51,600,000	3	7,466,678	3	14,739,914					3	22,206,592	100.00%	43.04%
2	17	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	4	55,800,000	4	8,500,000	4	12,750,000					4	21,250,000	100.00%	38.08%
2	17	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	96,450,000	69.18	11,265,000	70	22,411,000					100	33,676,000	100.00%	34.92%
2	17	1	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	10	58,850,000	7	11,265,000	6	12,238,000					10	23,503,000	100.00%	39.94%
2	17	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	44	25,600,000	8	-	9	4,160,000					17	4,160,000	38.64%	16.25%
2	17	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	12,000,000	-	-	1	6,013,000					1	6,013,000	100.00%	50.11%

2	17	2				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam (%)	6	25,022,100	-	-	-	-	-	-	7.24	-	120.67%	0.00%
2	17	2	2.02			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi (%)	4.92	25,022,100	-	-	-	-	-	-	5.79	-	117.68%	0.00%
2	17	2	2.02	1		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas (KSP/USP)	15	25,022,100	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2	17	3				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	30.82	57,257,300	28.07	-	29.82	9,180,000	-	-	31.39	9,180,000	101.85%	16.03%

2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota (%)	70.35	57,257,300	19.88	-	39.76	9,180,000								79.06	9,180,000	112.38%	16.03%
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi (koperasi)	136	57,257,300	34	-	68	9,180,000								136	9,180,000	100.00%	16.03%
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Percentase koperasi sehat (%)	31.25	75,411,750	28.89	-	30.43	74,822,000								31.88	74,822,000	102.02%	99.22%
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	49.70	75,411,750	42.02	-	44.92	74,822,000								50.72	74,822,000	102.05%	99.22%

2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP (koperasi)	15	75,411,750	-	-	15	74,822,000					15	74,822,000	100.00%	99.22%
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan (%)	10.71	75,542,750	11.53	-	-	75,145,000					11.27	75,145,000	105.23%	99.47%
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota (%)	17.74	75,542,750	19.23	-	-	75,145,000					18.80	75,145,000	105.98%	99.47%
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi (koperasi)	15	75,542,750	15	-	-	75,145,000					15	75,145,000	100.00%	99.47%

2	17	6			PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi (%)	3.15	25,569,120	-	-	-	-	-	-	4.51	-	143.17%	0.00%
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha (%)	3	25,569,120	-	-	-	-	-	-	3.75	-	125.00%	0.00%

2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, Nilai tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan pembiayaan penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi koperasi kewenangan kabupaten/kota (koperasi)	20	25,569,120	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	40	438,691,890	40.43	-	40.82	140,922,800				40.61	140,922,800	101.53%	32.12%
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha baru berskala mikro (UKM)	88	438,691,890	19	-	20	140,922,800				39	140,922,800	44.32%	32.12%
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	220	65,547,350	47	-	49	20,510,550				96	20,510,550	43.64%	31.29%

2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang bermitra (usaha mikro dan kecil)	50	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan (usaha mikro)	45	34,038,150	45	-	-	32,876,000						45	32,876,000	100.00%	96.59%
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM (usaha mikro dan kecil)	75	303,843,440		-	-	35	78,983,300					35	78,983,300	46.67%	25.99%
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha (Usaha mikro)	85	35,262,950	11	-	21	8,552,950						32	8,552,950	37.65%	24.25%
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio pertumbuhan skala usaha mikro (%)	2.27	121,884,620		-	-	8,378,400						2.87	8,378,400	126.43%	6.87%
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan skala usaha mikro (%)	6.82	121,884,620		-	-	8,378,400						7.42	8,378,400	108.80%	6.87%

2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha (usaha mikro dan kecil)	59	121,884,620	-	-	8,378,400	-	-	8,378,400	0.00%	6.87%		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi (%)	10	2,257,963,150	8.93	9,380,000	8.20	305,856,029			8.65	315,236,029.00	86.50%	13.96%
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (pasar)	6	2,215,803,800	-	9,000,000	-	292,516,029			-	301,516,029.00	0.00%	13.61%
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dibangunnya/revitalisasi pasar beserta sarana dan prasarana (pasar)	6	2,215,803,800	-	9,000,000	-	292,516,029			-	301,516,029.00	0.00%	13.61%

3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan (%)	70	42,159,350	-	380,000	100	13,340,000					100	13,720,000	142.86%	32.54%
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina (Pengelola pasar)	5	42,159,350	-	380,000	5	13,340,000					5	13,720,000	100.00%	32.54%
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	8	1,784,072,824	8.20	4,130,000	7.17	259,375,850					6.84	263,505,850	85.50%	14.77%
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali (%)	44	1,757,173,498	48.71	4,130,000	48.71	249,950,050					48.71	254,080,050	110.70%	14.46%
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan (Jurnal)	260	85,485,200	62	4,130,000	57	23,676,300					119	27,806,300	45.77%	32.53%

3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar (RTM)	16800	1,671,688,298	-	-	1,800	226,273,750					1,800	226,273,750	10.71%	13.54%
3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida (%)	100	26,899,326	90.60	-	81.04	9,425,800					99.90	9,425,800	99.90%	35.04%
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi (Laporan)	84	26,899,326	21	-	21	9,425,800					42	9,425,800	50.00%	35.04%
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor (%)	15	#REF!	13.79	-	54.47	34,820,650					36.14	34,820,650	240.93%	#REF!
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang (%)	40	#REF!	-	-	40	34,820,650					40	34,820,650	100.00%	#REF!
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha (Usaha)	225	14,141,100	-	-	-	1,178,000					-	1,178,000	0.00%	8.33%

3	30	5	2.01	2		Pameran Dagang Nasional	Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional (Produk)	1	171,805,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3	30	5	2.01	4		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah produk ekspor unggulan dalam rangka misi dagang (Produk)	1	79,465,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3	30	5	2.01	6		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina (pelaku usaha)	25	34,698,825	-	-	25	33,642,650	-	-	25	33,642,650	100.00%	96.96%	
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP (%)	5	206,367,100	2.86	8,001,900	2.63	24,852,200	2.34	---	---	2.33	32,854,100	46.60%	15.92%	
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi (%)	60	206,367,100	47.94	8,001,900	50.67	24,852,200				69.87	32,854,100	116.45%	15.92%	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapnya (UTTP) yang ditera/tera ulang (UTTP)	915	206,367,100	73	8,001,900	450	24,852,200				523	32,854,100	57.16%	15.92%	

3	31	4	2.01		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelola sesuai standar (%)	7	51,017,770	-	-	22,896,000						7.04	22,896,000	100.57%	44.88%
3	31	4	2.01	1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem informasi industri nasional (SINAS) (%)	50	51,017,770	-	-	22,896,000						100	22,896,000	200.00%	44.88%
					Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)	Jumlah data industri yang terintegrasi ke dalam sistem informasi industri nasional (SINAS) (dokumen)	1	51,017,770	-	-	22,896,000						22,896,000	0.00%	44.88%	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Sebagaimana program dan kegiatan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

Rancangan awal Renja Perubahan Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang. Selain itu, review ini juga didasari atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sehingga membutuhkan penyesuaian sebagai upaya sinergitas. Rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju RencanaTahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	SumberDana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif														
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah																
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																										
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	%	%	100 %	100 %	3,718,833,759	3,837,226,925	4,114,042,061					100 %	4,124,144,239												
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	%	%	100 %	100 %	73,770,469	60,057,765	60,057,765					100 %	74,558,097												
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu			2 dokumen	2 dokumen	27,063,751	24,069,700	24,069,700	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	2 dokumen	28,673,751	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian										
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKASKPD yang disusun tepat waktu			1 dokumen	1 dokumen	2,272,003	2,636,265	2,636,265	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	1 dokumen	2,272,003	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian										
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPASKPD yang disusun tepat waktu			1 dokumen	1 dokumen	1,996,803	2,531,300	2,531,300	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	1 dokumen	1,996,803	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian										
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			10 dokumen	n10 dokumen	38,640,540	30,820,500	30,820,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	10 dokumen	n 41,615,540	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian										
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara denganbaik	%	%	100 %	100 %	2,910,227,678	3,005,361,070	3,285,516,206					100 %	2,934,822,635												

2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				25 PNS	28 PNS	2,873,891,778	2,969,189,270	3,249,344,406	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	28 PNS	2,895,606,735	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian
---	----	----	------	----	----------------------------------	------------	--	--	--	--------	--------	---------------	---------------	---------------	---------------------------------------	-----------------------------	--	---	--------------------	--------	---------------	---

Renja Perubahan Tahun 2022

31

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional	Daerah		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	18 dokumen	n 39,215,900		
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuanganbulanan/triwulanansemesteran				18 dokument	18 dokument	36,335,900	36,171,800	36,171,800	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	18 dokumen	n 39,215,900	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian	
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	%	%	100 %	100 %	19,626,310	19,060,000	19,060,000							100 %	10,026,310		
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik DaerahSKPD yang disusun tepat waktu				2 dokument	2 dokument	9,026,310	19,060,000	19,060,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	2 dokument	10,026,310	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian	
2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Percentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	%	%	100 %	100 %	6,865,500	5,786,600	5,786,600							100 %	5,765,500		
2	17	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu				4 dokument	4 dokument	5,765,500	5,786,600	5,786,600	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	4 dokument	5,765,500	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Rara-rata Capaian kinerja AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %	97,339,869	69,159,040	65,819,040							100 %	126,600,000		
2	17	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai perangkat daerah				33 orang	33 orang	13,621,425	13,509,040	13,509,040	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	33 orang	14,630,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian	
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai lulus diklat berdasarkan TUSI				2 ASN	1 ASN	47,750,000	32,400,000	24,060,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	1 ASN	72,600,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian	
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek yang mampu mengimplementasikan peraturan perundangan				6 orang	6 orang	31,370,000	23,250,000	28,250,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	6 orang	39,370,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian	

Renja Perubahan Tahun 2022

32

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD %	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 %	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
2 17 01 2.06	Umum Perangkat Daerah	Administrasi	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja	administiasi umumPD							Kab.					100%		502,608,100		
2 17 01 2.06 01	n Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah jenis komponen			10 jenis	10 jenis	2,498,100	2,678,400	2,678,400	Luwu Timur, Malili, PuncukIndah	(PAD)	Untuk ASLI DAERAH Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Memperkuat Ketahanan PENDAPATANEKonomi	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	10 jenis	Dinas	Perdagangan, UKM	2,498,100 Koperasi,	
2 17 01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			4 unit	4 unit	2,000,000	1,573,500	1,573,500	Luwu Timur, Malili, PuncukIndah	(PAD)	Untuk ASLI DAERAH Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Memperkuat Ketahanan PENDAPATANEKonomi	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	4 unit	Dinas	Perdagangan, 2,000,000 Koperasi, UKM	2,000,000 Koperasi, UKM	
2 17 01 2.06 03	Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang	Jumlah peralatan rumah tangga yang			2 unit	2 unit	4,000,000	3,000,000	3,000,000	Luwu Timur, Malili, PuncukIndah	(PAD)	Untuk ASLI DAERAH Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Memperkuat Ketahanan PENDAPATANEKonomi	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	2 unit	Dinas	Perdagangan, 8,000,000 Koperasi, UKM	8,000,000 Koperasi, UKM	
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik	Tangga diadakan Kantor disediakan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang			20 jenis	20 jenis	3,263,000	3,252,350	3,252,350	Luwu Timur, Malili, PuncukIndah	(PAD)	Yang Berkualitas dan Berkeadilan Memperkuat Ketahanan PENDAPATANEKonomi	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	20 jenis	Dinas	Perdagangan, 6,000,000 Koperasi, UKM	6,000,000 Koperasi, UKM	
2 17 01 2.06 05	dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			3 jenis	3 jenis	12,800,000	12,800,000	12,800,000	Luwu Timur, Malili, PuncukIndah	(PAD)	Berkeadilan Memperkuat Ketahanan PENDAPATANEKonomi Untuk ASLI DAERAH Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	3 jenis	Dinas	Perdagangan, 14,000,000 Koperasi, UKM	14,000,000 Koperasi, UKM	
2 17 01 2.06 06	Perundangan- undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- undangan yang disediakan			60 exemplar	60 exemplar	7,320,000	7,320,000	7,320,000	Luwu Timur, Malili, PuncukIndah	(PAD)	Memperkuat Ketahanan PENDAPATANEKonomi Untuk ASLI DAERAH Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	60 exemplar	Dinas	Perdagangan, 8,000,000 Koperasi, UKM	8,000,000 Koperasi, UKM	
2 17 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya				282 orang	282 orang	4,000,000	7,470,000	7,470,000	Luwu Timur, Malili, PuncukIndah	(PAD)	PENDAPATANEKonomi Untuk ASLI DAERAH Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Memperkuat Ketahanan PENDAPATANEKonomi Untuk ASLI DAERAH Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM Dan Perindustrian	282 orang	Dinas	Perdagangan, 10,000,000 Koperasi, UKM	10,000,000 Koperasi, UKM	
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				294 kali	294 kali	310,020,000	329,706,400	329,706,400	Luwu Timur, Malili, PuncukIndah	(PAD)	Ketahanan PENDAPATANEKonomi Untuk ASLI DAERAH Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	294 kali	Dinas	Perdagangan, 447,110,000 Koperasi, UKM	447,110,000 Koperasi, UKM	

Renja Perubahan Tahun 2022

33

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah									
2	17	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis perangkat daerah			50 dokume	n50 dokume	n 2,000,000	26,000,000	26,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	50 dokume	n 5,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian			
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	%	%	100 %	100 %	16,019,236	42,400,000	42,400,000						100 %	88,000,000				
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan			4 unit	4 unit	3,499,736	17,400,000	17,400,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	4 unit	47,500,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian			
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan			4 unit	4 unit	10,500,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	4 unit	40,500,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian			
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %	100 %	139,963,597	144,091,800	144,091,800						100 %	161,763,597				
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat			1500 surat	1500 surat	14,763,597	15,691,800	15,691,800	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	1500 surat	21,763,597	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian			
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air terbayarkan			6 rekening	5 rekening	68,400,000	72,600,000	72,600,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	5 rekening	80,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian			
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan			4 orang	4 orang	55,800,000	55,800,000	55,800,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	4 orang	60,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian			

Renja Perubahan Tahun 2022

34

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
2	17	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	%	%	100 %	100 %	107,120,000	97,510,000	97,510,000						100 %	220,000,000				
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			10 unit	10 unit	58,850,000	58,850,000	58,850,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	10 unit	90,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian		
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan danmesin lainnya yang dipelihara			45 unit	45 unit	28,270,000	26,660,000	26,660,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	45 unit	70,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian		
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 unit	1 unit	20,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	1 unit	60,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDan Perindustrian		
2	17	02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	%	9.68 %	9.68 %	20,000,000	25,022,100	25,022,100						9.68 %	39,017,790				
2	17	02	2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantorcabang, cabang pembantu dan kantorkas koperasi	%	%	7.69 %	7.69 %	20,000,000	25,022,100	25,022,100						7.69 %	39,017,790				

Renja Perubahan Tahun 2022

35

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan IzinUsaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemenuhan izinsimpan pinjam, pembukaan kantorcabang, cabang pembantu dan kantorkas			20 KSP/USP	20 KSP/USP	20,000,000	25,022,100	25,022,100	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Koperasi	20 KSP/USP	39,017,790	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	%	%	32.63 %	32.63 %	29,139,000	96,007,300	80,837,300					32.63 %	130,207,000		
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi SimpanPinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	%	%	75.7 %	75.7 %	29,139,000	96,007,300	80,837,300					75.7 %	130,207,000		
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi			146 kopera	si146 kopera	si 29,139,000	96,007,300	80,837,300	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Koperasi	146 kopera	si 130,207,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	%	%	32.80 %	32.80 %	66,854,936	75,411,750	75,411,750					32.80 %	85,958,040		
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	%	%	51.62 %	51.62 %	66,854,936	75,411,750	75,411,750					51.62 %	85,958,040		

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP			15 KSP/USP	15 KSP/USP	66,854,936	75,411,750	75,411,750	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Koperasi	15 KSP/USP	85,958,040	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan	%	%	12.18 %	12.18 %	93,445,354	75,542,750	75,542,750					12.18 %	192,021,377		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten kota	%	%	25.31 %	25.31 %	93,445,354	75,542,750	75,542,750					25.31 %	192,021,377		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi			15 koperasi	15 koperasi	93,445,354	75,542,750	75,542,750	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Tomoni	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Koperasi	15 koperasi	192,021,377	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	17	06			PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi	%	%	4.90 %	4.90 %	10,000,000	25,569,120	25,569,120					4.90 %	41,243,790		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen , standarisasi dan strukturisasi usaha	%	%	4.9 %	4.9 %	10,000,000	25,569,120	25,569,120					4.9 %	41,243,790		

Renja Perubahan Tahun 2022

37

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota			20 koperasi	20 koperasi	10,000,000	25,569,120	25,569,120	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Koperasi	20 koperasi	41,243,790	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	%	45 %	45 %	133,267,254	237,566,390	227,786,890					45 %	440,941,870		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha baru berskala mikro	WUB	WUB	108 WUB	108 WUB	133,267,254	237,566,390	227,786,890					108 WUB	440,941,870		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem onlinedata system (ODS)			241 Usaha Mikro	241 Usaha Mikro	42,722,534	50,637,350	50,637,350	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	241 Usaha Mikro	79,075,500	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian	
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang bermitra			50 UMKM	0 UMKM	10,000,000	19,719,500	9,940,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0 UMKM	42,906,925	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian	

Renja Perubahan Tahun 2022

38

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan			40 Usaha Mikro	40 Usaha Mikro	25,544,720	34,038,150	34,038,150	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	40 Usaha Mikro	37,978,500	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian	
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM (responsif gender)			70 UMKM	70 UMKM	35,000,000	79,833,440	79,833,440	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	70 UMKM	167,423,445	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian	
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha			90 Usaha Mikro	90 Usaha Mikro	20,000,000	53,337,950	53,337,950	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	90 Usaha Mikro	113,557,500	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio pertumbuhan skala usaha mikro	%	%	3.89 %	3.89 %	90,000,000	114,461,600	114,461,600					3.89 %	261,759,750		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan skala usaha mikro	%	%	7.05 %	7.05 %	90,000,000	114,461,600	114,461,600					7.05 %	261,759,750		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha			10 UKM	10 UKM	90,000,000	114,461,600	114,461,600	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pelaku UKM	10 UKM	261,759,750	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				841,796,579	2,687,982,999	2,654,462,999							6,646,600,000			

Renja Perubahan Tahun 2022

39

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi	%	%	10 %	10 %	320,000,000	1,821,143,150	1,787,623,150	Kab. Luwu Timur, Angkona, Taripa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pedagang pasar	10 %	5,150,000,000				
3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar/sarana prasarana distibusi perdagangan yang termanfaatkan	pasar	pasar	2 pasar	2 pasar	300,000,000	1,797,753,800	1,764,233,800	Kab. Luwu Timur, Angkona, Wanassari	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pedagang pasar	2 pasar	5,000,000,000				
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarannya			2 pasar	2 pasar	300,000,000	1,797,753,800	1,764,233,800	Kab. Luwu Timur, Angkona, Taripa Kab. Luwu Timur, Angkona, Wanassari	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pedagang pasar	2 pasar	5,000,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
3	30	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan	%	%	70 %	70 %	20,000,000	23,389,350	23,389,350	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pengelola pasar	70 %	150,000,000				
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelolasarana distribusi perdagangan yangdibina			5 pengelola	5 pengelola	20,000,000	23,389,350	23,389,350	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pengelola pasar	5 pengelola	150,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	%	8.00 %	8.00 %	341,873,635	341,872,824	341,872,824	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pengelola pasar	8.00 %	676,600,000				

3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	%	%	44 %	44 %	314,973,899	314,973,498	314,973,498		44 %	646,600,000	
---	----	----	------	--	--	---	---	------	------	-------------	-------------	-------------	--	------	-------------	--

Renja Perubahan Tahun 2022

41

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan			260 jurnal	260 jurnal	85,485,420	85,485,200	85,485,200	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pedagang	260 jurnal	96,600,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar			2000 RTM	2000 RTM	229,488,479	229,488,298	229,488,298	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pedagang	2000 RTM	550,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	%	%	100 %	100 %	26,899,736	26,899,326	26,899,326					100 %	30,000,000		
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah penyalurandan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi			84 laporan	84 laporan	26,899,736	26,899,326	26,899,326	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Para distributor pupuk di Luwu Timur	84 laporan	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	%	15.00 %	15.00 %	119,616,303	300,109,925	300,109,925					15.00 %	670,000,000		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang	%	%	40 %	40 %	119,616,303	300,109,925	300,109,925					40 %	670,000,000		
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha			225 Usaha	225 Usaha	14,151,525	14,141,100	14,141,100	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pelaku ekspor	225 Usaha	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional			1 produk	1 produk	20,000,000	171,805,000	171,805,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pelaku ekspor	1 produk	300,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah produk ekspor unggulan dalam rangka misidagang			1 produk	1 produk	50,112,718	79,465,000	79,465,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pelaku ekspor	1 produk	300,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usahaekspor yang dibina			25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	35,352,060	34,698,825	34,698,825	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pelaku ekspor	25 Pelaku Usaha	40,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP	%	%	5 %	5 %	60,306,641	224,857,100	224,857,100				5 %	150,000,000			
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi	%	%	60 %	60 %	60,306,641	224,857,100	224,857,100				60 %	150,000,000			

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang			915 UTPP	915 UTPP	60,306,641	224,857,100	224,857,100	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Para pedagangdi pasar	915 UTPP	150,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						187,061,382	389,627,330	371,281,730						685,000,000		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	166,326,096	338,609,560	320,263,960						600,000,000	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang dibina	IKM	IKM	IKM	55 IKM	55 IKM	166,326,096	338,609,560	320,263,960						600,000,000	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM pangan dan handycraft yang difasilitasi dan dibina			20 IKM	20 IKM	110,441,075	177,327,750	177,327,750	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	IKM	20 IKM	350,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM dalam sentra yang dibina dan dikembangkan			25 IKM	25 IKM	35,591,863	113,322,000	113,322,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	IKM	25 IKM	150,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM panganya yang mendapatkan bantuan good manufacturing practice/GMP			20 IKM	20 IKM	20,293,158	47,959,810	29,614,210	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	IKM	20 IKM	100,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDTahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDTahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju RencanaTahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	SumberDana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	RKPDT 2022	APBD 2022	RKPDT 2022 Perubahan	Nasional	Daerah							
3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelola sesuai standar	%		%	7 %	7 %	20,735,286	51,017,770	51,017,770			7 %	85,000,000			
3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem informasi industri nasional (SINAS)	%		%	50 %	50 %	20,735,286	51,017,770	51,017,770			50 %	85,000,000			
3	31	04	2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)	Jumlah perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota yang dipantau dan dievaluasi dalam penyampaian data ke sistem informasi industri nasional (SINAS)				5 Usaha Industri	5 Usaha Industri	20,735,286	51,017,770	51,017,770	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan ekonomi Yang Berkualitas dan Berkeadilan	IKM 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	5 Usaha Industri	85,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
TOTAL									5,167,282,948	7,564,418,264	7,764,418,300						12,646,893,856			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026, sebagai berikut :

3.1.1 Tujuan :

1. Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat, dengan indikator :
 - ✓ Pengeluaran Per Kapita
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor IKM dan UMKM, dengan indikator :
 - ✓ Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan
 - ✓ Persentase UMKM yang naik kategori
3. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah, dengan indikator :
 - ✓ Nilai SAKIP perangkat daerah

3.1.2 Sasaran :

1. Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan indikator :
 - ✓ Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun
2. Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM dengan indikator :
 - ✓ Pertumbuhan nilai produksi IKM
 - ✓ Pertumbuhan nilai produksi UMKM
 - ✓ Persentase koperasi Aktif
 - ✓ Pertumbuhan sub sektor perdagangan

3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah, dengan indikator :
- ✓ Persentase capaian kinerja program perangkat daerah

Tabel.3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.	Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan barang pokok sepanjang waktu	95%
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri dan UMKM	Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	-Pertumbuhan nilai produksi IKM - Pertumbuhan nilai produksi UMKM - Persentase Koperasi aktif - Pertumbuhan sub sektor perdagangan	7,55%
		Persentase UMKM yang naik kategori		0,10% 77,10% 12,5%	77,10% 12,5%
3.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	95%

3.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

3.2.1 Program Utama

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan
Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

3. Program PENGEMBANGAN EKSPOR

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

Sub kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Sub kegiatan Pameran Dagang Nasional

Sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Eksport Unggulan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

5. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

9. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

10. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

11. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

12. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 Sub Kegiatan Pengadaan mebel
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Adapun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2022 dalam Tabel dibawah ini :

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif													
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah															
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																														
2		17																5,315,293,856												
2		17		01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	% %	100 % 100 %	3,718,833,759	3,837,226,925	4,114,042,061							100 %	4,124,144,239										
2		17		01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	% %	100 % 100 %	73,770,469	60,057,765	60,057,765							100 %	74,558,097										
2		17		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	27,063,751	24,069,700	24,069,700	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan layanan publik	Disperindagkop-UKM	2 dokumen	28,673,751	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian									
2		17		01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	2,272,003	2,636,265	2,636,265	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan layanan publik	Disperindagkop-UKM	1 dokumen	2,272,003	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian									
2		17		01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1,996,803	2,531,300	2,531,300	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan layanan publik	Disperindagkop-UKM	1 dokumen	1,996,803	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian									
2		17		01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 dokumen	10 dokumen	38,640,540	30,820,500	30,820,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan layanan publik	Disperindagkop-UKM	10 dokumen	41,615,540	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian									
2		17		01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	% %	100 % 100 %	2,910,227,678	3,005,361,070	3,285,516,206						100 %	2,934,822,635											

2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN			25 PNS	28 PNS	2,873,891,778	2,969,189,270	3,249,344,406	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	28 PNS	2,895,606,735	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
---	----	----	------	----	-----------------------------------	------------	--	--	--------	--------	---------------	---------------	---------------	---------------------------------------	-----------------------------	--	---	--------------------	--------	---------------	--

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah									
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwanuan/semesteran			18 dokument	18 dokument	36,335,900	36,171,800	36,171,800	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan layanan publik	Disperindagkop-UKM	18 dokument	39,215,900	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian					
2	17	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	%	%	100 %	100 %	19,626,310	19,060,000	19,060,000						100 %	10,026,310							
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu			2 dokumen	2 dokumen	9,026,310	19,060,000	19,060,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan layanan publik	Disperindagkop-UKM	2 dokumen	10,026,310	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian					
2	17	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Percentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	%	%	100 %	100 %	6,865,500	5,786,600	5,786,600						100 %	5,765,500							
2	17	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu			4 dokumen	4 dokumen	5,765,500	5,786,600	5,786,600	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan layanan publik	Disperindagkop-UKM	4 dokumen	5,765,500	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian					
2	17	01	2.05	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %	97,339,869	69,159,040	65,819,040						100 %	126,600,000						
2	17	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai perangkat daerah			33 orang	33 orang	13,621,425	13,509,040	13,509,040	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan layanan publik	Disperindagkop-UKM	33 orang	14,630,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian					
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai lulus diklat berdasarkan TUSI			2 ASN	1 ASN	47,750,000	32,400,000	24,060,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan layanan publik	Disperindagkop-UKM	1 ASN	72,600,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian					

2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek yang mampu mengimplementasikan peraturan perundangan			6 orang	6 orang	31,370,000	23,250,000	28,250,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	6 orang	39,370,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
---	----	----	------	----	--	---	--	--	---------	---------	------------	------------	------------	---------------------------------------	-----------------------------	--	---	--------------------	---------	------------	--

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas									
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah								
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	%	%	%	100 %	100 %	347,901,100	393,800,650	393,800,650						100 %	502,608,100					
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen				10 jenis	10 jenis	2,498,100	2,678,400	2,678,400	Kab. Luwu Timur, Malili, PuncukIndah Kab.	Ketahanan PENDAPATANEkonomi Untuk ASLI DAERAHPertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat \$) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	0 jenis	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	Dan Perindustrian					
2 17 01 2.06 02	Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			4 unit	4 unit	2,000,000	1,573,500	1,573,500	Luwu Timur, Malili, PuncukIndah Kab.	Ketahanan PENDAPATANEkonomi Untuk ASLI DAERAHPertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat \$) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	4 unit	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	Dan Perindustrian					
2 17 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga diadakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang				2 unit	2 unit	4,000,000	3,000,000	3,000,000	Luwu Timur, Malili, PuncukIndah Kab.	Ketahanan PENDAPATANEkonomi Untuk ASLI DAERAHPertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat \$) Perbaikan ketahanan	Disperindagkop-UKM	2 unit	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	Dan Perindustrian	Dinas				
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor disediakan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang				20 jenis	20 jenis	3,263,000	3,252,350	3,252,350	Luwu Timur, Malili, PuncukIndah Kab.	Ketahanan PENDAPATANEkonomi Untuk ASLI DAERAHPertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat \$) Perbaikan ketahanan	Disperindagkop-UKM	20 jenis	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	Dan Perindustrian					
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang				3 jenis	3 jenis	12,800,000	12,800,000	12,800,000	Luwu Timur, Malili, PuncukIndah Kab.	Ketahanan PENDAPATANEkonomi Untuk ASLI DAERAHPertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat \$) Perbaikan ketahanan	Disperindagkop-UKM	3 jenis	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	Dan Perindustrian	Dinas				
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan undangan yang				60 exemplar	60 exemplar	7,320,000	7,320,000	7,320,000	Luwu Timur, Malili, PuncukIndah Kab. Luwu	Ketahanan PENDAPATANEkonomi Untuk ASLI DAERAHPertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan \$) Perbaikan ketahanan	Disperindagkop-UKM	60 exemplar	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	Dan Perindustrian	Dinas				
2 17 01 2.06 07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya				282 orang	282 orang	4,000,000	7,470,000	7,470,000	Luwu Timur, Malili, PuncukIndah Kab.	Ketahanan PENDAPATANEkonomi Untuk ASLI DAERAHPertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat \$) Perbaikan ketahanan	Disperindagkop-UKM	282 orang	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	Dan Perindustrian	Dinas				
2 17 01 2.06 08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang				294 kali	294 kali	310,020,000	329,706,400	329,706,400	Luwu Timur, Malili, PuncukIndah	Ketahanan PENDAPATANEkonomi Untuk ASLI DAERAHPertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat \$) Perbaikan ketahanan	Disperindagkop-UKM	294 kali	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	Dan Perindustrian	Dinas				
2 17 01 2.06 09	SKPD diselenggarakan	Konsultasi SKPD yang																				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis perangkat daerah				50 dokumen	50 dokumen	2,000,000	26,000,000	26,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	50 dokumen	5,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	%	%	100 %	100 %	16,019,236	42,400,000	42,400,000							100 %	88,000,000	
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan				4 unit	4 unit	3,499,736	17,400,000	17,400,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	4 unit	47,500,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				4 unit	4 unit	10,500,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	4 unit	40,500,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %	100 %	139,963,597	144,091,800	144,091,800							100 %	161,763,597	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat				1500 surat	1500 surat	14,763,597	15,691,800	15,691,800	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	1500 surat	21,763,597	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air terbayarkan				6 rekening	5 rekening	68,400,000	72,600,000	72,600,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	5 rekening	80,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan				4 orang	4 orang	55,800,000	55,800,000	55,800,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	4 orang	60,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
2	17	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	%	%	100 %	100 %	107,120,000	97,510,000	97,510,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	100 %	220,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian			
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			10 unit	10 unit	58,850,000	58,850,000	58,850,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	10 unit	90,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			45 unit	45 unit	28,270,000	26,660,000	26,660,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	45 unit	70,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 unit	1 unit	20,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disperindagkop-UKM	1 unit	60,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
2	17	02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Percentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	%	9.68 %	9.68 %	20,000,000	25,022,100	25,022,100						9.68 %	39,017,790				
2	17	02	2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	%	%	7.69 %	7.69 %	20,000,000	25,022,100	25,022,100						7.69 %	39,017,790				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas									
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah								
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemenuhan izin simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas			20 KSP/USP	20 KSP/USP	20,000,000	25,022,100	25,022,100	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Koperasi	20 KSP/USP	39,017,790	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian				
2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	%	%	32.63 %	32.63 %	29,139,000	96,007,300	80,837,300						32.63 %	130,207,000						
2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	%	%	75.7 %	75.7 %	29,139,000	96,007,300	80,837,300						75.7 %	130,207,000						
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi			146 koperasi	146 koperasi	29,139,000	96,007,300	80,837,300	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Koperasi	146 koperasi	130,207,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian				
2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	%	%	32.80 %	32.80 %	66,854,936	75,411,750	75,411,750						32.80 %	85,958,040						
2	17	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	%	%	51.62 %	51.62 %	66,854,936	75,411,750	75,411,750						51.62 %	85,958,040						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP			15 KSP/USP	15 KSP/USP	66,854,936	75,411,750	75,411,750	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Koperasi	15 KSP/USP	85,958,040	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan	%	%	12.18 %	12.18 %	93,445,354	75,542,750	75,542,750						12.18 %	192,021,377				
2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten kota	%	%	25.31 %	25.31 %	93,445,354	75,542,750	75,542,750						25.31 %	192,021,377				
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi			15 koperasi	15 koperasi	93,445,354	75,542,750	75,542,750	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Tomoni	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Koperasi	15 koperasi	192,021,377	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaankoperasi	%	%	4.90 %	4.90 %	10,000,000	25,569,120	25,569,120						4.90 %	41,243,790				
2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen , standarisasi dan strukturisasi usaha	%	%	4.9 %	4.9 %	10,000,000	25,569,120	25,569,120						4.9 %	41,243,790				

Renja Perubahan Tahun 2022 61

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota			20 koperasi	20 koperasi	10,000,000	25,569,120	25,569,120	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Koperasi	20 koperasi	41,243,790	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	%	45 %	45 %	133,267,254	237,566,390	227,786,890						45 %	440,941,870				
2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha baru berskala mikro	WUB	WUB	108 WUB	108 WUB	133,267,254	237,566,390	227,786,890						108 WUB	440,941,870				
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)			241 Usaha Mikro	241 Usaha Mikro	42,722,534	50,637,350	50,637,350	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	UMKM	241 Usaha Mikro	79,075,500	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang bermitra			50 UMKM	0 UMKM	10,000,000	19,719,500	9,940,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	UMKM	0 UMKM	42,906,925	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan			40 Usaha Mikro	40 Usaha Mikro	25,544,720	34,038,150	34,038,150	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	UMKM	40 Usaha Mikro	37,978,500	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM (responsif gender)			70 UMKM	70 UMKM	35,000,000	79,833,440	79,833,440	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	UMKM	70 UMKM	167,423,445	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha			90 Usaha Mikro	90 Usaha Mikro	20,000,000	53,337,950	53,337,950	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	UMKM	90 Usaha Mikro	113,557,500	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio pertumbuhan skala usaha mikro	%	%	3.89 %	3.89 %	90,000,000	114,461,600	114,461,600						3.89 %	261,759,750				
2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan skala usaha mikro	%	%	7.05 %	7.05 %	90,000,000	114,461,600	114,461,600						7.05 %	261,759,750				
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha			10 UKM	10 UKM	90,000,000	114,461,600	114,461,600	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pelaku UKM	10 UKM	261,759,750	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																			
											841,796,579	2,687,982,999	2,654,462,999						6,646,600,000				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi	%	%	10 %	10 %	320,000,000	1,821,143,150	1,787,623,150						10 %	5,150,000,000		
3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang termanfaatkan	Jumlah pasar/sarana prasarana distibusi perdagangan yang termanfaatkan	pasar	pasar	2 pasar	2 pasar	300,000,000	1,797,753,800	1,764,233,800						2 pasar	5,000,000,000		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasaranaanya			2 pasar	2 pasar	300,000,000	1,797,753,800	1,764,233,800	Kab. Luwu Timur, Angkona, Taripa Kab. Luwu Timur, Angkona, Wanansari	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pedagang pasar	2 pasar	5,000,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	30	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan	%	%	70 %	70 %	20,000,000	23,389,350	23,389,350						70 %	150,000,000		
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelolasarana distribusi perdagangan yang dibina			5 pengelola	5 pengelola	20,000,000	23,389,350	23,389,350	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamata Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pengelola pasar	5 pengelola	150,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	%	8.00 %	8.00 %	341,873,635	341,872,824	341,872,824						8.00 %	676,600,000		
3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	%	%	44 %	44 %	314,973,899	314,973,498	314,973,498						44 %	646,600,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan		260 jurnal	260 jurnal	85,485,420	85,485,200	85,485,200	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pedagang	260 jurnal	96,600,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar		2000 RTM	2000 RTM	229,488,479	229,488,298	229,488,298	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pedagang	2000 RTM	550,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Percentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	%	%	100 %	100 %	26,899,736	26,899,326	26,899,326					100 %	30,000,000			
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah penyalurandan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi		84 laporan	84 laporan	26,899,736	26,899,326	26,899,326	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Para distributor pupuk di Luwu Timur	84 laporan	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Percentase peningkatan nilai ekspor	%	%	15.00 %	15.00 %	119,616,303	300,109,925	300,109,925						15.00 %	670,000,000				
3	30	05	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang	%	%	40 %	40 %	119,616,303	300,109,925	300,109,925						40 %	670,000,000				
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha			225 Usaha	225 Usaha	14,151,525	14,141,100	14,141,100	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pelaku eksport	225 Usaha	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional			1 produk	1 produk	20,000,000	171,805,000	171,805,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pelaku eksport	1 produk	300,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah produk ekspor unggulan dalam rangka misi dagang			1 produk	1 produk	50,112,718	79,465,000	79,465,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pelaku eksport	1 produk	300,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina			25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	35,352,060	34,698,825	34,698,825	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pelaku eksport	25 Pelaku Usaha	40,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP	%	%	5 %	5 %	60,306,641	224,857,100	224,857,100					5 %	150,000,000		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang diawasi	%	%	60 %	60 %	60,306,641	224,857,100	224,857,100					60 %	150,000,000		

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang			915 UTPP	915 UTPP	60,306,641	224,857,100	224,857,100	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Para pedagang di pasar	915 UTPP	150,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					187,061,382	389,627,330	371,281,730						685,000,000			
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	166,326,096	338,609,560	320,263,960						1 Dokumen	600,000,000	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang dibina	IKM	IKM	55 IKM	55 IKM	166,326,096	338,609,560	320,263,960						55 IKM	600,000,000	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM pangan dan handycraft yang difasilitasi dan dibina			20 IKM	20 IKM	110,441,075	177,327,750	177,327,750	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	IKM	20 IKM	350,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM dalam sentra yang dibina dan dikembangkan			25 IKM	25 IKM	35,591,863	113,322,000	113,322,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	IKM	25 IKM	150,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM panganya mendapatkan binaan good manufacturing practice/GMP			20 IKM	20 IKM	20,293,158	47,959,810	29,614,210	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	IKM	20 IKM	100,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	%	%	7 %	7 %	20,735,286	51,017,770	51,017,770						7 %	85,000,000				
3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	%	%	50 %	50 %	20,735,286	51,017,770	51,017,770						50 %	85,000,000				
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			5 Usaha Industri	5 Usaha Industri	20,735,286	51,017,770	51,017,770	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan NEkonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	IKM	5 Usaha Industri	85,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
TOTAL								5,167,282,948	7,564,418,264	7,764,418,300								12,646,893,856				

BAB IV

PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitman pimpinan dan segenap staf Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2022 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

Malili, Juni 2022

KEPALA DINAS



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP:19751001 199612 1 001